

**EFEKTIVITAS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PEMULIHAN WISATA
ALAM GROJOGAN SEWU PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN
KARANGANYAR**

Abdullah Azzam, Dr. Dra. Kushandajani, M.S.

Email: abdullahazzam2453@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Tembalang, Kota Semarang, 50275

Telepon: 024-7465407

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan *Collaborative Governance* dalam pemulihan sektor wisata alam Grojogan Sewu pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Karanganyar. Kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dengan PT. Duta Indonesia Djaya menjadi fokus utama penelitian, dengan tujuan menilai sejauh mana kerja sama ini berkontribusi terhadap pemulihan sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu telah memenuhi indikator efektivitas menurut DeSeve, yang mencakup struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar pemangku kepentingan, kepastian tata kelola, akses terhadap wewenang, pembagian tanggung jawab, berbagi informasi, serta akses terhadap sumber daya. Kolaborasi ini terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperbaiki infrastruktur pariwisata, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui program ekonomi kreatif dan pelatihan keterampilan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perlunya evaluasi kebijakan secara berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan komunikasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi optimalisasi strategi pemasaran digital, peningkatan layanan berbasis keberlanjutan, serta penerapan kebijakan adaptif guna menjaga daya saing wisata alam di era pascapandemi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan model tata kelola kolaboratif untuk sektor pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, efektivitas, pariwisata, Grojogan Sewu, pascapandemi COVID-19.

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of Collaborative Governance in the recovery of the Grojogan Sewu natural tourism sector after the COVID-19 pandemic in Karanganyar Regency. The collaboration between the Karanganyar Regency Department of Tourism and Sports and PT. Duta Indonesia Djaya is the primary focus of this research, aiming to assess the extent to which this partnership contributes to tourism recovery. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach, where data is collected through in-depth interviews, observations, literature reviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of Collaborative Governance in managing the Grojogan Sewu Nature Tourism Park has met DeSeve's effectiveness indicators, which include networked structure, commitment to common goals, trust among stakeholders, governance certainty, access to authority, distribution of responsibilities, information sharing, and access to resources. This collaboration has positively impacted the increase in tourist visits, improvement of tourism infrastructure, and empowerment of local communities through creative economy programs and skill development training. However, this study also identifies several challenges that need to be addressed, such as the need for periodic policy evaluations, enhancement of human resource capacity, and strengthening communication among the government, private sector, and local communities. The recommendations proposed include optimizing digital marketing strategies, improving sustainability-based services, and implementing adaptive policies to maintain the competitiveness of natural tourism in the post-pandemic era. This study is expected to serve as a reference for local governments and other stakeholders in developing a more effective and sustainable collaborative governance model for the tourism sector.

Keywords: Collaborative Governance, effectiveness, tourism, Grojogan Sewu, post-pandemic COVID-19

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara kesatuan, Indonesia menerapkan sistem distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah melalui kombinasi desentralisasi dan sentralisasi. Sistem desentralisasi ini tidak bertujuan untuk memisahkan kedua tingkat pemerintahan, melainkan untuk meningkatkan kolaborasi antar unit pemerintah dalam mengelola negara. Prinsip Otonomi Daerah menjadi landasan dari sistem ini, yang merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat terkait struktur negara dan pemerintahan. Kerangka tata kelola ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana tanggung jawab pemerintah dibagi, termasuk dalam sektor pariwisata, yang menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pariwisata telah menjadi sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata mencakup berbagai aktivitas perjalanan yang didukung oleh fasilitas dan layanan dari masyarakat, pelaku bisnis, serta pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan pariwisata meliputi perjalanan individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau eksplorasi atraksi tertentu, biasanya dalam jangka waktu sementara.

Perkembangan sektor pariwisata tidak hanya terlihat di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di mana pariwisata dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Contohnya dapat dilihat di

daerah-daerah seperti Yogyakarta, Bali, dan berbagai kota serta provinsi lainnya di Indonesia. Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena telah menjadi kebutuhan masyarakat, dengan dampak positif yang dirasakan di berbagai sektor regional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang dihasilkan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Karanganyar berusaha menjadikan sektor pariwisata berbasis alam dan kearifan lokal sebagai sumber pendapatan daerah, terletak di lereng Gunung Lawu sehingga memiliki potensi alam dan budaya yang sangat kaya. Dengan keindahan alam yang memukau, seperti air terjun Grojogan Sewu, kebun teh Kemuning, dan kawasan wisata Candi Suku, Kabupaten Karanganyar memiliki daya tarik wisata yang menjanjikan. Selain itu, kearifan lokal yang masih terjaga, seperti upacara adat dan kerajinan tangan, dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan pariwisata. Dengan memfokuskan pembangunan pada sektor pariwisata, Kabupaten Karanganyar dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021), yang menyatakan bahwa daerah dengan potensi alam dan budaya yang dikelola secara baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Misalnya, dengan mengembangkan desa wisata yang memadukan keindahan alam dan budaya lokal, masyarakat dapat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, atau penjual cenderamata. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga melestarikan budaya lokal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2020), pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Selain manfaat ekonomi, pengembangan pariwisata dan kearifan lokal juga dapat memperkuat identitas budaya Kabupaten Karanganyar. Dengan mempromosikan budaya lokal, seperti batik khas Karanganyar atau upacara adat yang unik, daerah ini dapat membangun citra yang kuat sebagai destinasi wisata budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat UNESCO (2019) yang menyatakan bahwa pelestarian kearifan lokal melalui pariwisata dapat menjadi sarana untuk mempertahankan warisan budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan tradisi. Dengan demikian, Kabupaten Karanganyar tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga dapat menjaga kelestarian budaya untuk generasi mendatang.

Pemerintah kabupaten mengetahui bahwa Karanganyar memiliki potensi wisata alam yang sangat tinggi. Salah satu destinasi wisata

unggulannya adalah Grojogan Sewu di Tawangmangu, sebuah air terjun alami yang menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Keindahan alam serta daya tarik dari Grojogan Sewu menjadikannya ikon wisata Karanganyar dan memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian daerah. Mengingat potensi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan wisata ini *collaborative governance* guna menghadirkan pengelolaan wisata yang lebih profesional dan berdaya saing.

Penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata di Indonesia terkait dengan upaya meningkatkan daya saing destinasi wisata. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, tetapi seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kebijakan, dan minimnya partisipasi masyarakat lokal. Dengan menerapkan *collaborative governance*, semua pihak dapat bekerja sama untuk merumuskan strategi yang holistik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan destinasi wisata tidak merusak lingkungan atau mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Selain itu, *collaborative governance* dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan pariwisata di Indonesia. Saat ini, sebagian besar destinasi wisata terkonsentrasi di beberapa daerah seperti Bali, Yogyakarta, atau Lombok, sementara daerah lain yang memiliki potensi serupa masih tertinggal. Dengan melibatkan pemerintah

daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam proses pengelolaan, diharapkan dapat terjadi pemerataan pembangunan pariwisata. *Collaborative governance* juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ansell dan Gash (2008) menunjukkan bahwa collaborative governance efektif dalam menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk masalah publik yang kompleks, termasuk pengelolaan pariwisata.

Kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengelolaan Grojogan Sewu merupakan implementasi dari konsep *Collaborative Governance*. Konsep ini menekankan kolaborasi antara kedua pihak dalam pengembangan, promosi, dan optimalisasi daya tarik wisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta sinergi positif yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas wisata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama dalam sektor UMKM, transportasi, dan perhotelan.

Namun dalam keberjalanan kolaborasi Indonesia mengalami pandemi Covid-19 sehingga semua aktivitas termasuk pariwisata menjadi terganggu. Kabupaten Karanganyar menghadapi tantangan serius seiring dengan penyebaran virus yang meluas. Karanganyar dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik dengan keindahan alam, situs sejarah, dan budaya yang kaya. Langkah-langkah pembatasan, lockdown, serta kekhawatiran

akan kesehatan masyarakat memicu penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang berkunjung. Situs-situs wisata yang sebelumnya ramai, seperti Candi Sukuh, Grojogan Sewu, dan Taman Balekambang, mengalami penurunan kunjungan yang signifikan. Industri pariwisata di Karanganyar terdampak secara luas, termasuk pengelolaan akomodasi, restoran, dan usaha kecil lainnya. Banyak pelaku usaha pariwisata terpaksa menutup sementara atau mengurangi operasional mereka karena minimnya kunjungan wisatawan.

terdapat penurunan jumlah wisatawan lokal di Grojogan Sewu pada tahun 2020 yang hanya menyentuh 146.976, pada tahun 2021 Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sering kita sebut sebagai PSBB sehingga wisata alam grojogan sewu mendapat jumlah pengunjung lokal yang meningkat berada pada angka 154.317 pada tahun 2021. Namun jumlah ini masih dirasa kurang terutama bagi para pengusaha lokal yang merasakan dampak langsung pada penghasilan dan keberlanjutan usaha mereka, terutama yang bergantung pada kehadiran wisatawan. Selain itu, sektor kerajinan dan industri kreatif yang terkait dengan pariwisata seperti kerajinan tangan dan produk suvenir lokal, juga mengalami penurunan. Pekerja di sektor ini merasakan dampak ekonomi secara langsung, dengan hilangnya pesanan dan penjualan yang menurun tajam.

B. KAJIAN TEORI

1. *Collaborative Governance*

collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008)

menekankan empat tahapan utama, yakni kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Kondisi awal mencakup faktor-faktor yang mendorong perlunya kolaborasi, seperti adanya ketergantungan antar-pihak, ketidakpastian, atau konflik yang membutuhkan solusi bersama. Selanjutnya, desain institusional menentukan struktur dan aturan dalam proses kolaborasi agar partisipasi para pemangku kepentingan berlangsung secara inklusif dan transparan. Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam mengelola dinamika kelompok, membangun kepercayaan, serta memastikan setiap pihak terlibat secara aktif. Adapun proses kolaboratif mencakup interaksi langsung antar-pihak, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap hasil yang telah disepakati bersama.

Dalam praktiknya, *collaborative governance* menjadi pendekatan yang relevan untuk menangani berbagai permasalahan publik, termasuk dalam pemulihan kawasan wisata. Pemulihan wisata alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar, misalnya, membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan guna mengatasi tantangan yang ada. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *collaborative governance*, diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan serta implementasi program pemulihan yang berkelanjutan. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada kemauan dan komitmen semua pihak untuk membangun

tata kelola yang transparan dan berbasis konsensus.

Berdasarkan analisis terhadap teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, pendekatan *collaborative governance* dalam pemulihan wisata Grojogan Sewu dapat dievaluasi melalui keselarasan dengan keempat tahapan yang telah diuraikan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas kolaborasi yang terjalin serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi tata kelola kolaboratif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami peran *collaborative governance* dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata berbasis keberlanjutan.

2. Efektivitas atau Keberhasilan Kolaborasi

Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat dan optimal. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, efektivitas mencerminkan sejauh mana kerja sama antara pemangku kepentingan berhasil mencapai target yang telah disepakati. Menurut DeSeve (dalam Sudarmo, 2011), efektivitas *collaborative governance* dapat diukur melalui delapan indikator utama, yaitu struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar-pihak, kepastian tata kelola, akses terhadap wewenang, pembagian tanggung jawab, berbagi informasi, serta akses terhadap sumber daya. Indikator-indikator ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana tata kelola kolaboratif

mampu menciptakan kebijakan yang inklusif dan implementatif.

Struktur jaringan dalam *collaborative governance* menggambarkan bagaimana hubungan antar-pihak terbentuk dalam proses kolaborasi. Milward dan Proven (dalam Sudarmo, 2011) mengategorikan jaringan ke dalam tiga bentuk, yaitu *self-governance*, *lead organization*, dan *network administrative organization*, yang masing-masing memiliki mekanisme koordinasi tersendiri. Selain itu, keberhasilan kolaborasi juga ditentukan oleh komitmen terhadap tujuan bersama, di mana setiap pemangku kepentingan harus memiliki pemahaman yang seragam mengenai visi dan misi kolaborasi. Faktor lain yang berperan penting adalah tingkat kepercayaan antar-pihak. Kepercayaan yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka, memperlancar komunikasi, serta meminimalkan konflik yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan.

Kepastian tata kelola juga menjadi aspek krusial dalam *collaborative governance*, yang mencakup kejelasan batas partisipasi (*boundary and exclusivity*), aturan main (*rules*), kebebasan dalam menentukan arah kolaborasi (*self-determination*), serta mekanisme pengelolaan jaringan (*network management*). Selain itu, akses terhadap wewenang menentukan sejauh mana pemangku kepentingan memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Faktor pembagian tanggung jawab yang jelas juga berkontribusi terhadap efektivitas kolaborasi, karena setiap

pihak memahami perannya dan bertanggung jawab terhadap kontribusinya.

keberhasilan *collaborative governance* bergantung pada keterbukaan dalam berbagi informasi serta akses terhadap sumber daya. Berbagi informasi yang efektif memastikan bahwa setiap pihak memiliki data dan pemahaman yang sama, sehingga koordinasi dapat berjalan lebih baik. Sementara itu, akses terhadap sumber daya, baik dalam bentuk finansial, teknologi, maupun sumber daya manusia, menjadi faktor pendukung utama yang memungkinkan implementasi kebijakan secara optimal. Dengan memperhatikan kedelapan indikator ini, efektivitas *collaborative governance* dapat diukur secara sistematis, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif bagian terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci yang sesuai dengan fokus penelitian, dari proses penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif analisis, sehingga dapat menjabarkan serta menggambarkan perihal yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti yakni berkaitan tentang bagaimana dan sejauh mana efektivitas *collaborative governance* dalam pemulihan wisata alam grojogan sewu pasca pandemi covid-19 di kabupaten karanganyar sehingga pembahasan ini bisa dimakutkan untuk membantu pihak terkait untuk menilai serta memberikan masukan terhadap proses kolaborasi yang sudah

berjalan sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki kedua belah pihak.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN ***Collaborative Governance* Dalam** **Pemulihan Wisata Alam Grojogan Sewu** **Pasca Pandemi Covid-19**

1. Proses *Collaborative Governance*

Collaborative governance antara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar dengan PT. Duta Indonesia Djaya dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu menunjukkan dinamika kolaborasi yang kompleks namun berpotensi menghasilkan manfaat berkelanjutan. Kolaborasi ini diawali dengan kondisi awal yang didukung oleh potensi pariwisata alam yang signifikan di Grojogan Sewu, serta sejarah kerja sama yang telah berlangsung sejak 2007. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diperbarui setiap lima tahun menjadi landasan formal bagi kedua pihak untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan bersama. Meskipun terdapat tantangan seperti ketidakseimbangan sumber daya dan keterbatasan anggaran, kolaborasi ini berhasil memadukan keunggulan masing-masing pihak, di mana Disparpora fokus pada promosi dan pemberdayaan masyarakat, sementara PT. Duta Indonesia Djaya mengelola operasional dan pemeliharaan fasilitas.

Desain institusional yang transparan dan adil menjadi kunci keberhasilan kolaborasi ini. Aturan dasar yang tertuang dalam PKS memastikan kejelasan peran,

hak, dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga meminimalkan potensi konflik. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah berperan penting dalam memediasi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dialog tatap muka yang dilakukan secara berkala, meskipun tidak selalu konsisten, menjadi sarana penting untuk membangun kepercayaan dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Kepercayaan ini semakin diperkuat oleh komitmen kedua belah pihak terhadap proses kolaborasi, yang tercermin dalam upaya pemulihan pascapandemi COVID-19.

Proses kolaborasi dalam pengelolaan Grojogan Sewu melibatkan dialog, pembangunan kepercayaan, dan pemahaman bersama yang mendalam. Meskipun angka kunjungan wisatawan belum kembali ke level sebelum pandemi, *small wins* seperti peningkatan jumlah pengunjung dan pemanfaatan media sosial untuk promosi menunjukkan kemajuan bertahap. Hasil sementara ini menjadi indikator bahwa kolaborasi berjalan ke arah yang benar, meskipun tantangan seperti keterbatasan inovasi dan infrastruktur masih perlu diatasi. Peningkatan jumlah wisatawan pada akhir tahun 2023, meskipun belum mencapai target 300 ribu pengunjung, memberikan optimisme bahwa kolaborasi ini dapat mencapai tujuan jangka panjang.

Pemahaman bersama antara Disparpora dan PT. Duta Indonesia Djaya tercermin

dalam kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, konservasi, dan sosial. Kedua pihak menyadari bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan UMKM dan pembangunan bank sampah menjadi contoh nyata dari komitmen ini. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa manfaat kolaborasi dirasakan secara merata.

Tantangan utama yang dihadapi dalam kolaborasi ini adalah ketidakseimbangan sumber daya dan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan renovasi dan pembaruan fasilitas. PT. Duta Indonesia Djaya, sebagai pengelola utama, menghadapi tekanan finansial akibat penurunan jumlah wisatawan pascapandemi. Sementara itu, Disparpora berfokus pada promosi dan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat serta diversifikasi daya tarik wisata di Grojogan Sewu.

2. Efektivitas Collaborative

Efektivitas *collaborative governance*

antara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar dengan PT. Duta Indonesia Djaya dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu menunjukkan hasil yang cukup positif. Berdasarkan delapan indikator efektivitas *collaborative governance* menurut DeSeve, kolaborasi ini telah memenuhi beberapa aspek penting, seperti struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar pihak, dan kepastian tata kelola. Struktur jaringan yang berbasis *lead organization* menempatkan Disparpora sebagai koordinator utama yang memfasilitasi kerja sama antara pihak swasta, masyarakat lokal, dan instansi terkait. Komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama, seperti pelestarian lingkungan, pengembangan fasilitas, dan peningkatan ekonomi lokal, menjadi landasan utama dalam kolaborasi ini. Selain itu, kepercayaan yang terjalin antara para pihak menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan minim konflik.

Kepastian tata kelola dalam kolaborasi ini tercermin melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. PKS ini menjadi kerangka kerja yang jelas dan transparan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembagian tanggung jawab yang terstruktur juga memungkinkan kedua belah pihak untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing. Disparpora fokus pada promosi, pemberdayaan

masyarakat, dan koordinasi, sementara PT. Duta Indonesia Djaya bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan pemeliharaan fasilitas. Sinergi ini memastikan bahwa tujuan bersama dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Proses berbagi informasi yang terbuka dan transparan menjadi kunci keberhasilan kolaborasi ini. Komunikasi yang terjalin tidak hanya melalui forum formal, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari, memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini membantu meminimalisir potensi konflik dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Selain itu, akses terhadap sumber daya yang memadai, baik finansial, infrastruktur, maupun sumber daya manusia, memberikan dukungan yang signifikan terhadap keberlanjutan kolaborasi. PT. Duta Indonesia Djaya, sebagai pengelola utama, memiliki akses terhadap sumber daya internal, sementara Disparpora memanfaatkan sumber daya eksternal untuk mendukung pengembangan TWA Grojogan Sewu.

Meskipun kolaborasi ini telah menunjukkan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dampak pandemi COVID-19 masih terasa, di mana jumlah kunjungan wisatawan belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Hal ini menimbulkan tekanan finansial bagi PT. Duta Indonesia

Djaya dalam memenuhi kewajiban operasional dan pemeliharaan fasilitas. Sementara itu, Disparpora masih perlu meningkatkan dukungan finansial dan subsidi untuk pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Evaluasi kebijakan yang lebih rutin dan strategis diperlukan untuk menyesuaikan langkah-langkah pemulihan dengan kebutuhan aktual di lapangan.

Partisipasi masyarakat lokal juga menjadi aspek penting dalam kolaborasi ini. Meskipun tidak secara formal terlibat dalam PKS, kelompok masyarakat seperti “Perdabita” memainkan peran krusial dalam mendukung pengelolaan TWA Grojogan Sewu. Kegiatan seperti kerja bakti bulanan dan program penghijauan melibatkan masyarakat lokal secara aktif, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Namun, partisipasi ini perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih inklusif, memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan dapat merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan wisata.

Dalam konteks promosi, Disparpora telah memanfaatkan platform digital seperti website Pesona Karanganyar dan akun Instagram @pariwisata.karanganyar untuk meningkatkan visibilitas TWA Grojogan Sewu. Upaya ini membantu menarik minat wisatawan, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Namun, strategi promosi perlu terus ditingkatkan dengan inovasi baru, seperti konten kreatif dan kampanye digital yang lebih agresif, untuk mempercepat pemulihan jumlah kunjungan

wisatawan. Selain itu, kolaborasi dengan influencer dan media lokal dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan promosi.

Kolaborasi ini berhasil memadukan keunggulan masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama, seperti pelestarian lingkungan, peningkatan fasilitas, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, tantangan seperti dampak pandemi, keterbatasan finansial, dan kebutuhan inovasi promosi masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pengelolaan wisata alam ini. Dengan memperkuat koordinasi, evaluasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat, kolaborasi ini berpotensi menjadi model tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan dalam sektor pariwisata alam.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas *collaborative governance* dalam pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu pascapandemi COVID-19 menunjukkan hasil yang cukup baik. Kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar dengan PT. Duta Indonesia Djaya memenuhi delapan indikator efektivitas menurut DeSeve, meliputi struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar pihak, kepastian tata kelola, akses terhadap wewenang, pembagian tanggung jawab, berbagi informasi, serta akses

terhadap sumber daya. Struktur jaringan berbasis *lead organization* menempatkan Disparpora sebagai koordinator utama, sementara PT. Duta Indonesia Djaya bertindak sebagai pelaksana operasional. Komitmen kedua belah pihak terhadap tujuan bersama, seperti pelestarian lingkungan, pengembangan fasilitas, dan peningkatan ekonomi lokal, menjadi faktor kunci keberhasilan kolaborasi ini. Kepercayaan yang tinggi antar pihak juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan minim konflik, sementara kepastian tata kelola melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur.

Meskipun kolaborasi ini telah menunjukkan hasil positif, beberapa tantangan masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan belum mencapai tingkat sebelum pandemi, menimbulkan tekanan finansial bagi PT. Duta Indonesia Djaya. Disparpora, meskipun telah menjalankan tanggung jawab dalam promosi dan koordinasi, masih perlu meningkatkan dukungan finansial dan infrastruktur untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata. Evaluasi kebijakan yang lebih rutin diperlukan untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan aktual di lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pariwisata, baik dari segi keterampilan maupun profesionalisme, menjadi aspek krusial untuk memastikan

pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas *collaborative governance* ke depannya, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kerja sama perlu dilakukan untuk memastikan semua pihak tetap berada pada koridor yang telah ditentukan. Evaluasi ini juga dapat mengidentifikasi kendala yang muncul dan memberikan solusi yang tepat waktu. Kedua, penguatan kapasitas kelompok masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran mereka dalam pengelolaan TWA Grojogan Sewu, sehingga manfaat kolaborasi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat setempat. Ketiga, komunikasi yang intensif dan terbuka antara semua pihak harus terus dijaga. Selain melalui forum formal, komunikasi informal yang lebih sering dapat memperkuat hubungan antar pihak dan meminimalkan potensi kesalahpahaman.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, kolaborasi dalam pengelolaan TWA Grojogan Sewu diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta lingkungan. Optimalisasi strategi pemasaran digital, inovasi promosi, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal akan menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata pascapandemi. Dengan demikian,

collaborative governance ini tidak hanya mendukung keberlanjutan wisata alam, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal di Kabupaten Karanganyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Gash, C. A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Oxford University Press on behalf of the Public Management Research Association*.
- Sudarmo. 2011. Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance. Surakarta: Smart Media.
- AVIANTO, A. M. (2021). GOVERNANCE INNOVATION. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*.
- Ritchie, B. W. (2004). Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the tourism industry. *Science Direct*.
- Tabassum, S. (2013). PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: AN OVERVIEW. *he Indian Journal of Political Science*.
- Irfan Nugrohol, Y. A. (2020). SINERGITAS PROGRAM “FANTASTIC! PONOROGO” DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
- Rillia Aisyah Haris, F. ,. (2022). PENGEMBANGAN WISATA BUKIT TAWAP LENG-LENG DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE

- GOVERNANCE. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*.
- Zaenuri, M. (2014). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *Journal UNISA*.
- Matthoriq, S. Z. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
- Shui-Yan Tang, D. A. (2018). An Agenda for the Study of Collaborative Governance. *ResearchGate*.
- Muhamad Abdel Apalso, K. S. (2022). PENGEMBANGAN PARIWISATA KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE STUDI DI KAMPUNG BLANGKON POTROJAYAN KELURAHAN SERENGAN KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA . *Jurnal Administrasi Publik*.
- Tabassum, S. (2013). PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP: AN OVERVIEW. *he Indian Journal of Political Science*.
- Gamal Suwantoro, SH. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Bandung 2012.
- Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se* *Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana 5.3, 2013.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004)
- Maruapey, M. Husein. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara*. JIPSi Volume VII No. 1 Juni 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.
- Sutopo, HB, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Penerbit UNS Press, 1992.